



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (KIP) DALAM PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Putri Febriana W¹, Dwi Marcheila², Sadrini Tri Wulandari³, Anneke Rofiqoh G⁴, Aulia Rahmawati⁵

Universitas Bandar Lampung^{1,2,3,4,5}

putri.22111028@student.ubl.ac.id¹, dwi.22111010@student.ubl.ac.id², 23111009@student.ubl.ac.id³,
23111085@student.ubl.ac.id⁴, aulia@ubl.ac.id⁵

Abstrak

Program Indonesia Pintar (KIP) merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi KIP di Kota Bandar Lampung berdasarkan empat indikator teori George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data sekunder berupa dokumen Dinas Pendidikan, data penerima KIP, peraturan perundangan, serta penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi KIP di Kota Bandar Lampung telah berjalan cukup baik berdasarkan jumlah penerima bantuan yang mencapai 21.344 siswa pada tahun 2023. Namun masih ditemukan kendala berupa kurang optimalnya komunikasi kepada orang tua siswa, keterbatasan sumber daya administrasi sekolah, serta perbedaan disposisi pelaksana yang berdampak pada keterlambatan pencairan dan kurangnya transparansi. Struktur birokrasi juga berjalan formal namun koordinasi antarinstansi masih perlu diperkuat. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan dapat meningkat apabila sistem sosialisasi, digitalisasi administrasi, dan pengawasan pelaksanaan diperkuat.

Kata Kunci: *Program Indonesia Pintar, Implementasi Kebijakan, Pemerataan Pendidikan*

Abstract

The Indonesia Smart Program (KIP) is a government policy designed to improve equitable access to education, particularly for students from low-income families. This article aims to analyze the implementation of KIP in Bandar Lampung City based on the four indicators of George C. Edward III's theory, namely communication, resources, implementer disposition, and bureaucratic structure. This study uses a qualitative descriptive method with secondary data consisting of documents from the Education Office, KIP beneficiary data, legislation, and previous research. The results show that the implementation of KIP in Bandar Lampung City has generally run well, as indicated by the number of aid recipients reaching 21,344 students in 2023. However, several challenges remain, including suboptimal communication with parents, limited administrative resources in schools, and varying implementer dispositions that lead to delays in fund disbursement and a lack of transparency. The bureaucratic structure operates formally, but inter-agency coordination still needs strengthening. These findings indicate that policy effectiveness can improve if socialization systems, administrative digitalization, and implementation oversight are strengthened.

Keywords: *Indonesia Smart Program, Policy Implementation, Educational Equity*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak konstitusional sebagaimana tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31. Pemerintah berkewajiban menjamin terselenggaranya pendidikan yang adil dan merata tanpa terkendala kondisi ekonomi. Salah satu bentuk implementasi kewajiban tersebut adalah Program Indonesia Pintar (KIP) dengan tujuan memberikan bantuan biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

Secara nasional, jumlah penerima PIP tahun 2022 mencapai 17,9 juta siswa dengan target peningkatan menjadi 18,6 juta pada tahun 2024. Di Provinsi Lampung tercatat 374.769 penerima, sedangkan di Kota Bandar Lampung pada tahun 2023 tercatat sebanyak 21.344 siswa yang menerima bantuan dengan rincian 11.527 siswa SD dan 9.817 siswa SMP. Tingginya jumlah penerima menunjukkan keberhasilan program dalam memperluas akses pendidikan, namun implementasinya

masih menyisakan persoalan keterlambatan pencairan, ketidaktepatan sasaran, serta kelemahan koordinasi birokrasi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi Program Indonesia Pintar (KIP) dalam pemerataan akses pendidikan di Kota Bandar Lampung dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas implementasi program berdasarkan teori implementasi kebijakan publik George C. Edward III.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara rinci bagaimana implementasi Program Indonesia Pintar (KIP) dijalankan di Kota Bandar Lampung. Pendekatan ini dipilih karena penelitian lebih menekankan pada proses, dinamika pelaksanaan kebijakan, serta kendala-kendala yang muncul dalam realitas pelaksanaan program di lapangan. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat memahami konteks pelaksanaan kebijakan secara lebih komprehensif berdasarkan informasi tertulis, laporan resmi, dan sumber literatur pendukung.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh bukan secara langsung melalui observasi atau wawancara, melainkan dari berbagai dokumen dan sumber tertulis. Data tersebut meliputi peraturan pemerintah yang berkaitan dengan implementasi KIP, seperti Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2014 tentang Program Indonesia Pintar, serta Petunjuk Teknis Penyaluran Dana KIP. Selain itu, penelitian juga menggunakan laporan statistik penerima KIP di tingkat nasional, provinsi, hingga Kota Bandar Lampung yang bersumber dari Dinas Pendidikan dan portal data pendidikan. Literatur ilmiah berupa jurnal, artikel, dan laporan hasil penelitian terdahulu turut digunakan untuk memperkaya analisis dan memperkuat argumentasi mengenai efektivitas implementasi KIP.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelaah dokumen resmi, peraturan, laporan kinerja pemerintah, artikel berita, dan kajian ilmiah yang relevan. Proses dokumentasi dilakukan dengan cara membaca, menyeleksi, serta mencatat informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Program Indonesia Pintar. Dari proses ini, peneliti memperoleh gambaran mengenai bagaimana mekanisme penyaluran bantuan dijalankan, bagaimana struktur birokrasi bekerja, serta bagaimana respons masyarakat dan sekolah sebagai pelaksana teknis program.

Analisis data dilakukan melalui proses membaca dan memahami seluruh dokumen kemudian menyusunnya kembali dalam bentuk uraian yang sistematis sesuai fokus penelitian. Data yang diperoleh direduksi dengan memilih informasi yang paling relevan untuk menjawab tujuan penelitian. Selanjutnya, peneliti menafsirkan data berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang menekankan empat aspek utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Melalui proses analisis ini, peneliti dapat menarik pemahaman mengenai efektivitas implementasi Program Indonesia Pintar serta hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian, metode penelitian yang digunakan tidak hanya menggambarkan fakta pelaksanaan KIP, tetapi juga memberikan penilaian kritis mengenai sejauh mana kebijakan berjalan sesuai tujuan awal program serta faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilannya. Hasil analisis ini diharapkan memberikan gambaran utuh mengenai mekanisme implementasi Program Indonesia Pintar di Kota Bandar Lampung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Edward III (dalam Subarsono, 2019), keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada pelaksana dan penerima

manfaat. Komunikasi yang efektif mencakup kejelasan informasi, konsistensi pesan, serta pemahaman yang sama antara pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan.

Dalam konteks pelaksanaan Program Indonesia Pintar (KIP) di Kota Bandar Lampung, komunikasi kebijakan dilakukan melalui jalur resmi, yaitu surat edaran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) kepada Dinas Pendidikan Kota, kemudian diteruskan ke sekolah-sekolah penerima program. Meskipun mekanisme komunikasi telah tersusun secara struktural, masih ditemukan kesenjangan informasi antara dinas, sekolah, dan orang tua penerima manfaat.

Sebagai contoh, pada SDN 2 Keteguhan, sejumlah orang tua peserta didik mengaku tidak memahami mekanisme pencairan dana bantuan karena kurangnya sosialisasi dari pihak sekolah (SmartNews Lampung, 2023). Kondisi ini memperlihatkan bahwa kejelasan komunikasi belum sepenuhnya optimal, sehingga masih menimbulkan kesalahpahaman di tingkat pelaksana dan penerima program.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Turhindayani (2020) yang menjelaskan bahwa hambatan komunikasi sering kali menjadi faktor utama yang menghambat implementasi kebijakan publik, karena informasi tidak tersampaikan secara utuh kepada pelaksana kebijakan di tingkat bawah.

Sumber Daya (*Resources*)

Menurut Edward III (dalam Winarno, 2020), sumber daya merupakan elemen penting dalam implementasi kebijakan yang mencakup kemampuan pelaksana, dana, sarana dan prasarana, serta ketersediaan informasi. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan tidak dapat berjalan secara optimal.

Dalam pelaksanaan Program KIP di Kota Bandar Lampung, sumber daya manusia di tingkat sekolah dan dinas pendidikan memiliki peran strategis dalam memastikan kelancaran proses penyaluran dana bantuan pendidikan. Berdasarkan laporan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung (2023), keterbatasan tenaga administrasi di beberapa sekolah menyebabkan proses verifikasi dan validasi data melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) menjadi lambat.

Selain itu, keterlambatan pencairan dana bantuan juga disebabkan oleh hambatan administratif di lembaga perbankan yang menjadi penyalur dana. Temuan ini diperkuat oleh Aziz (2019), yang menyatakan bahwa hambatan administratif dan kurangnya tenaga teknis yang terlatih menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas implementasi Program KIP secara nasional.

Dari sisi infrastruktur, beberapa sekolah di wilayah pinggiran Kota Bandar Lampung juga menghadapi keterbatasan fasilitas teknologi informasi, sehingga memengaruhi kecepatan dan ketepatan penginputan data penerima bantuan. Dengan demikian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana pendukung menjadi keharusan agar program dapat berjalan lebih efektif.

Disposisi atau Sikap Pelaksana (*Disposition*)

Edward III (1980) menegaskan bahwa sikap, motivasi, dan komitmen pelaksana kebijakan merupakan faktor penentu keberhasilan implementasi. Apabila pelaksana memiliki pemahaman yang baik dan mendukung tujuan kebijakan, maka pelaksanaannya cenderung efektif. Sebaliknya, apabila pelaksana bersikap apatis, maka hasil kebijakan akan menurun.

Dalam konteks Program KIP di Bandar Lampung, sikap pelaksana (kepala sekolah, guru, dan pejabat dinas pendidikan) menunjukkan variasi yang cukup beragam. Misalnya, pada kasus SDN 1 Perumnas Way Halim, muncul dugaan adanya pungutan terhadap wali murid penerima bantuan PIP. Pihak sekolah membantah tuduhan tersebut dengan alasan bahwa pencairan dilakukan secara kolektif melalui bank sesuai ketentuan (Handal Online, 2024). Meskipun demikian, kasus ini menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan dan integritas pelaksana program di tingkat sekolah.

Penelitian oleh Rohmah dan Kasmawanto (2022) menunjukkan bahwa rendahnya komitmen pelaksana kebijakan berpotensi menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran. Sementara itu, Suhada (2024) menekankan pentingnya pengawasan internal dan pelatihan etika administrasi publik bagi aparatur pendidikan agar pelaksanaan kebijakan dapat berlangsung dengan transparan dan akuntabel.

Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Edward III menjelaskan bahwa struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian kewenangan, rantai komando, serta prosedur pelaksanaan kebijakan. Struktur yang terlalu panjang dan kompleks sering kali memperlambat proses implementasi (Subarsono, 2019).

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (KIP) terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu:

Kemendikbudristek → Dinas Pendidikan Provinsi Lampung → Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung → Sekolah → Siswa penerima manfaat.

Meskipun struktur ini telah diatur secara formal, koordinasi antartingkat birokrasi masih belum optimal. Laporan Ilham Saputra et al. (2025) menyebutkan bahwa lemahnya koordinasi antarinstansi menyebabkan keterlambatan penyaluran bantuan di beberapa daerah, termasuk Bandar Lampung.

Di sisi lain, Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 27 Tahun 2021 telah menetapkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan secara jelas, termasuk dalam pelaksanaan program bantuan pendidikan. Namun, efektivitas implementasi di tingkat sekolah tetap memerlukan pengawasan yang berkelanjutan agar rantai birokrasi tidak hanya formal, tetapi juga fungsional dalam memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat.

Analisis Keseluruhan

Berdasarkan keempat variabel teori Edward III, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Indonesia Pintar (KIP) di Kota Bandar Lampung berjalan cukup baik secara administratif, namun belum optimal secara substantif. Program ini telah menjangkau ribuan siswa dari keluarga berpenghasilan rendah, tetapi masih menghadapi kendala dalam aspek komunikasi, keterbatasan sumber daya, disposisi pelaksana, serta koordinasi antarbirokrasi.

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan intensitas sosialisasi dan komunikasi kebijakan kepada sekolah serta masyarakat penerima manfaat.
2. Memberikan pelatihan administrasi dan etika publik bagi pelaksana program di tingkat sekolah dan dinas pendidikan.
3. Mengembangkan sistem digitalisasi pengawasan penyaluran bantuan guna meminimalisasi kesalahan data dan potensi pungutan liar.
4. Memperkuat koordinasi antarinstansi pendidikan dan keuangan agar proses penyaluran bantuan menjadi lebih cepat, tepat, dan akuntabel

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan data resmi, implementasi Program Indonesia Pintar (KIP) di Kota Bandar Lampung tahun 2023 telah menjangkau 21.344 siswa SD dan SMP, menunjukkan keberhasilan distribusi bantuan pendidikan secara kuantitatif. Mekanisme penyaluran melalui Dapodik dan Dinas Pendidikan Kota berjalan sesuai prosedur resmi, sehingga aspek komunikasi dan struktur birokrasi dapat dikatakan terlaksana dengan baik. Namun, keterbatasan data membuat analisis terhadap aspek sumber daya dan disposisi pelaksana tidak dapat dilakukan, sehingga efektivitas program hanya dapat dinilai dari cakupan administratif dan jumlah penerima.

Pemerintah daerah dan sekolah perlu melakukan evaluasi lanjutan untuk memastikan ketepatan sasaran penerima KIP, misalnya melalui verifikasi data tambahan dan sosialisasi yang lebih intensif. Selain itu, sekolah diharapkan menjaga kelengkapan administrasi agar penyaluran bantuan berjalan lancar, sedangkan peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian lapangan yang melibatkan wawancara atau observasi, sehingga aspek sumber daya dan disposisi dapat dianalisis secara lebih mendalam.

REFERENSI

- Adibowo, R., & Al Amin, M. S. (2025). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Infrastruktur Ketenagalistrikan Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 15(1), 137-155.
- Aziz, Antartila Rezki. 2019. "Implementasi Instruksi Presiden (Inpres) No 07 Tahun 2014 Tentang

- Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Masyarakat Miskin Di Indonesia.” *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 4(2):58–68.
- Ilham Saputra, Ragil Muhammad, Okta Kartika Rahmadhani, Nazwa Sefina Hikmayanti, Firly Amelia, Aisyah Dani Rosyada, and Joko Tri Nugraha. 2025. “Kontribusi Program KIP-K Terhadap Peningkatan Motivasi Dan Sikap Belajar Mahasiswa Di Universitas Tidar.” *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 5(1):16.
- Mahulae, S. (2025). Pelayanan Informasi Publik Dalam Lembaga Pendidikan: Studi Evaluatif Pada Implementasi Uu Kip Di Perguruan Tinggi Negeri. *Jurnal Ilmiah Aquinas*, 158-164.
- Rohmah, Eva Nur Laily and Zuli Kasmawanto. 2022. “Implementasi Program Kipk Di Perguruan Tinggi Swasta.” *MADANI: Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 14(1):85–104.
- Suhada, A. (2024). Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan (Studi Di SDN Tonjong 1). *Jurnal Administrasi Publik Riset Inovatif*, 1(1), 64-74.
- Suaib, H., Rakia, A. S. R., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). *Pengantar kebijakan publik*. Humanities Genius.
- Turhindayani, T. (2020). Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 4(4).
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan penelitian kualitatif: Konsep, prosedur, kelebihan dan peran di bidang pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198-211.
- Zuhri, W. O. N., & Utha, A. (2025). Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (Kip) Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan Di Sman 2 Batauga Kabupaten Buton Selatan. *Rez Publica*, 11(1), 83-93.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2014 tentang Program Indonesia Pintar (PIP).
- Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 20 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Program Indonesia Pintar.
- Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan.
- Katadata. (2024). *Data Penerima Program Indonesia Pintar 2024*. Diambil kembali dari <https://databoks.katadata.co.id>
- Kemendikbudristek. (2024). *Portal Program Indonesia Pintar (PIP)*. Diambil kembali dari <https://pip.kemdikbud.go.id>
- Kemenkeu, M. (2024). *Laporan Anggaran PIP dan Target Penerima Nasional*. Diambil kembali dari <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id>
- Lampung, S. (2023). *Penahanan Buku Tabungan Siswa Penerima PIP di SDN 2 Keteguhan*. Diambil kembali dari <https://smartnewslampung.co.id>
- Online, H. (2024). *Kasus Dugaan Pungutan PIP di SDN 1 Perumnas Way Halim*. Diambil kembali dari <https://handalonline.com>